eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, Volume 7 (No 1): 306-320

ISSN 2502-5961 (Cetak), ISSN 2502-597x (Online), ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

**PERAN HUMAS DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**Dwi Putri Anggraeni1*,*Endang Erawan2,Hairunnisa3**

***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dokumen dan dokumentasi. Sumber dan jenis data yang pada penelitian ini dengan memilih satu orang key-informant dan informan pada data primer, data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen milik Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kemudian teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan Model Interaktif dari Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mensosialisasikan peraturan walikota nomor 51 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok telah berperan dalam mensukseskan peraturan walikota tersebut dengan menjalan peran sebagai seorang humas sebagai fungsi manajemen sebagai berikut: (1) peran humas sebagai communicator yaitu sebagai penhubung antara organisasi dengan masyarakat, humas sebagai komunikator dilakukan dengan melakukan komunikasi secara langsung yaitu dengan penyuluhan dan kunjungan kesehatan dan secara tidak langsung dengan melalui perantara media massa. (2) peran humas sebagai relationship yaitu membina hubungan organisasi dengan publik melalui kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga kemasyarakatan lain. (3) peran humas sebagai back up management yaitu pendukung fungsi manajemen dalam organisasi dalam melalui tahapan proses manajemen yaitu tahap awal perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengkomunikasian (communication), pengendalian atau pengawasan (controlling), dan sampai pada tahap akhir penilaian (evaluation)*

***Kata kunci*** *: Peran Humas, Sosialisasi, Kawasan Tanpa Rokok*

**Pendahuluan**

Di Kota Samarinda, kesehatan lingkungan merupakan hal yang menjadi sorotan pemerintah dalam meningkatkan kualitas alam dan kualitas manusia yang baik. Melihat kondisi Kota Samarinda yang semakin pesat, kemajuan industri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sebuah gaya hidup menuju modern. Masyarakat Kota Samarinda diberikan fasilitas untuk memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Kenyamanan ini pula haruslah didukung dengan lingkungan serta udara yang sehat, terutama asap rokok yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Nina Endang Rahayu, mengatakan bahwa perokok saat ini semakin merambat ke usia muda. Jumlah perokok aktif di Kota Samarinda paling banyak ditemukan pada usia produktif 30-40 tahun. Usia pertama kali merokok terhitung sebanyak 51,5% rentang di usia remaja 15-19 tahun sesuai hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013. Namun, sekarang anak usia 5-9 tahun saja sudah mulai merokok. (kaltim.prokal.co)

Jika mengutip dari pernyataan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap keberadaan rokok yang dapat membahayakan orang sekitar seharusnya menjadi suatu perhatian penting untuk kemudian dapat menciptakan lingkungan yang sehat tanpa asap rokok. Keberadaan rokok saat ini sudah menerpa seluruh lapisan masyarakat. Bagi perokok aktif, tidak bisa dipungkiri bahwa merokok menjadi suatu rutinitas yang wajib dilakukan setelah melakukan aktifitas tertentu seperti setelah makan atau hanya sekedar duduk untuk bersantai. Bagi mereka, merokok dapat mengurangi rasa stress dan depresi yang timbul setelah melakukan aktifitas yang melelahkan dan kegiatan yang menguras banyak pikiran sehingga kapanpun dan dimanapun mereka bisa mereka lakukan. Para perokok aktif sering kita jumpai di tempat-tempat umum seperti taman dan ruang terbuka. Walaupun perokok aktif merokok diruang terbuka, disisi lain hal ini justru merugikan pihak lain yaitu para perokok pasif.

Seperti kisah Roby Indra Wahyuda, pria asal Samarinda yang meninggal karena kanker laring dan paru-paru yang harus dia derita diusia yang masih muda 26 tahun. Roby divonis kanker laring stadium 3, bahkan pita suaranya harus diangkat. Sejak dini, Roby sudah mengenal rokok ketika duduk dibangku sekolah dasar. Kisah ini dikemas dalam sebuah iklan yang pernah ditayangkan di beberapa stasiun penyiaran swasta maupun lokal. Berawal ketika Roby tidak percaya akan bahayanya rokok bagi kesehatan, namun setelah dewasa dan divonis mengidap penyakit kanker mematikan akhirnya Roby tahu dan melalui media sosial dia menyuarakan untuk jauhi rokok. Hal ini menjadi sebuah peringatan serius bagi seluruh masyarakat bahwa rokok dapat merenggut nyawa seseorang tanpa ada batasan usia. Dan terbukti pula bahwa kesehatan manusia juga bergantung pada manusia itu sendiri. (Detik Health, 2015)

Dari fenomena yang telah dicantumkan sebelumnya, hal tersebut menjadi bagian dari tugas dan tanggungan bagi pemerintah untuk menjamin masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Dalam sebuah sistem kepemerintahan, sebuah kebijakan dibuat atas dasar perintah pejabat-pajabat dengan tujuan menyampaikan aturan-aturan negara yang telah ditetapkan. Kebijakan dalam setiap bidang suatu instansi pemerintah secara seluruhnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Seorang humas memiliki tugas untuk membangun ‘sebuah jembatan’ yang menghubungkan kepentingan instansi kepada kelompok masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan tujuan menyampaikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan bidang lembaga terkait.

Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Kawasan Tanpa Rokok menjadi pembicaraan hampir sebagian daerah guna menciptakan sebuah lingkungan yang sehat tanpa asap rokok sehingga kebijakan peraturan ini menjadi tanggapan serius oleh pemerintah. Layaknya peraturan yang ditetapkan di berbagai ibukota dibeberapa provinsi, kota Samarinda ibukota Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu kota di Indonesia yang menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh Walikota Samarinda bapak H. Syaharie Jaang, SH, M.Si yang tercatat dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 51 tahun 2012 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahaya bagi kesehatan. Selain perokok aktif, perokok pasif juga dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan menghindari asap rokok”. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk menjalankan program pemerintah tentang kawasan tanpa rokok. Salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan program pemerintah melalui sosialisasi yang berkaitan dengan Peraturan Walikota tentang kawasan tanpa rokok adalah instansi Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan sebuah lembaga milik pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan yang ada di Kota Samarinda. Dalam sebuah lembaga, terdapat humas atau hubungan masyarakat yang sering disebut sebagai orang yang bisa menjadi penghubungan antara lembaga dengan publik.

Secara struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda, terdapat Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan salah satu seksi dari tiga seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat yang mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menunjukkan kemiripan dalam pelaksanaan dan menjalanan tugas dan fungsi dari humas. Sehingga Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya bisa dikatakan memiliki peran yang sama seperti layaknya humas menjalanan perannya dalam suatu instansi atau lembaga.

Dalam pengertian humas, adapun peran utama dari seorang humas pada intinya adalah humas sebagai penghubung antara organisasi atau lembaga yang mewakilinya kepada masyarakat, humas berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak pubiknya, humas juga sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi, dan peran humas dalam menciptakan citra bagi lembaganya (Rosady Ruslan, 2007:10). Sehingga peran humas dalam ranah pemerintahan sangatlah dibutuhkan dalam mencapai tujuan lembaga yang ingin dicapai. Dengan disebutkan ketetapan peraturan tersebut, maka disinilah humas berperan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memberikan informasi dan melaksanakan agenda pemerintah yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Peran Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Seorang humas memiliki tugas untuk membangun ‘sebuah jembatan’ yang menghubungkan kepentingan instansi kepada kelompok masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan tujuan menyampaikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan bidang lembaga terkait.

Dari penjelasan diatas merupakan gambaran bagaimana humas berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai kegiatan. Disinilah humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda membangun sebuah hubungan dengan pihak-pihak lain dalam mendukung kepentingan instansi serta menunjukkan kinerja dari humas tersebut. Keberadaan humas bisa dikatakan sebagai harapan bagi lembaga yang mewakilinya. Peran dari seorang humas akan lebih baik jika diiringi dengan bagaimana humas dapat membangun pemahaman bersama dari berbagai pihak serta instansi pemerintah lain di Samarinda dalam menunjang terlaksananya sosialisasi Peraturan Walikota nomor 51 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari uraian tersebut, maka Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan ini. Dengan demikian, berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada peranan dari Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda.

**Kerangka Dasar Teori**

***Komunikasi Humas***

Menurut *Frank Jefkins* mendefinisikannya dengan batasan humas sebagai “sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, yakni antara suatu organisasi dengan semua khalayak atau publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian” (Neni Yulianita, 2012). Humas memiliki inti senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak baik itu dari publik terhadap organisasi maupun organisasi terhadap publiknya sehingga hal ini diharapkan keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga secara keseluruhan dapat tercapai.

***Peran***

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2013:212). Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam suatu interaksi kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

***Humas***

Hubungan masyarakat (humas) yang bisa juga disebut sebagai public relations memang sudah tidak asing. Biasanya bisa dilihat dari dibentuknya “bagian humas” atau “divisi humas” dalam suatu lembaga pemerintahan atau perusahaan. Sebagian orang memahami humas sebagai sebuah aktivitas, sebagian yang lain memahaminya sebagai sebuah profesi.

Secara umum, humas merupakan singkatan dari ‘hubungan masyarakat’ di mana kegiatan humas selalu berkaitan dengan hubungan sosial terhadap masyarakat luas. Humas didefinisikan sebagai suatu bujukan kepada publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta niat baik, yang diungkapan oleh Edward L. Berney dalam bukunya The Engineering of Consent (1955) (Morissan, 2010:6)

***Fungsi Humas***

Menurut Djanalis Djanaid (1993) dalam buku Public Relations: Teori dan Praktek (Frida Kusumastuti, 2002:22) disebutkan ada dua fungsi Public Relations, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif sebagai berikut :

1. Fungsi Konstruktif

Djanalis menganalogikan fungsi ini sebagai “perata jalan”. Jadi, humas merupakan “garda” terdepan yang di belakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan perusahaan/lembaga. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalita, dan sebagainya. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi/lembaga, humas menyiapkan “mental” organisasi/lembaga untuk memahami kepentingan publik, humas mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk merekomendasikan kepada managemen, humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi/lembaga yang di wakilinya. Fungsi konstruktif ini mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk disini humas bertindak secara preventif (mencegah).

1. Fungsi Korektif

Apabila kita mengibaratkan fungsi konstruktif sebagai “perata jalan”, maka fungsi korektif berperan sebagai “pemadam kebakaran” (Djanalis, 1993). Yakni, apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi/lembaga, maka peranan yang dapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi/lembaga terjadi masalah-masalah (kritis) dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesainya masalah tersebut. Fungsi yang kedua ini memang manjadi berat, sama halnya dengan suatu penyakit, ketika orang sudah dalam keadaan sakit, maka upaya selanjutnya adalah mengobati menuju upaya kesembuhan. Karena mengobati adalah salah satu upaya penyembuhan, maka dapat jadi upaya ini gagal total sehingga menyebabkan kematian. Anehnya, humas di Indonesia sering kali dipanggil pada saat terjadi krisis. Sementara pada saat situasi “aman-aman” saja humas dibuat “nganggur” atau disfungsi. Lebih aneh lagi, seringkali humas disalahkan bila dalam penanganan krisis menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Inilah yang sejak lama menjadi unek-unek para praktisi humas. Ibaratnya, dia hanya mendapatkan “kotoran kuda”, yang diminta mengendalikan kuda, tetapi tidak pernah diawak merawat kuda yang sedang berontak –jauh sebelumnya.

***Humas Pemerintah***

Pengertian humas pemerintah tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, namun humas pemerintahan memiliki posisi yang penting dalam suatu instansi atau Dinas tertentu. Keberadaan humas pemerintah bahkan merupakan suatu keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Peranan humas pemerintahan dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, yaitu memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa/pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak.

Dengan ini, humas pemerintahan memiliki fungsi pokok yang menjadi dasar sebagai landasan dari seluruh kegiatan dan kerja humas pemerinatah yaitu sebagai di halaman berikut:

1. Mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang mewakilinya;
2. Memberikan pelayanan, menyebarluarkan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijakan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat;
3. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, menampung aspirasi atau opini publik, memperhatikan keinginan publiknya di lain pihak;
4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jadi peran taktis dan strategi kehumasan pemerintahan / BUMN menyangkut hal sebagai berikut :

* 1. Tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasaran. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemudian memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran instansi/lembaga yang mewakilinya.
	2. Tugas strategis (jangka panjang), yakni berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), memberikan sumbang saran, gagasan dan ide-ide cemerlang secara kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga instansi/lembaga yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.

Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya, secara rutin, yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.
2. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.
3. Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.
4. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.
5. Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, press release, news letter, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster dan lain sebagainya.

***Peran Humas***

Perkembangan profesionalisme public relations atau humas yang berkaitan dengan perkembangan peranan PR, baik sebagai praktisi maupun profesional dalam suatu organisasi atau perusahaan, menurut Dozier D.M., (1992) merupakan salah satu kunci untuk memahami fungsi public relations dan komunikasi organisasi. Selain itu, hal tersebut juga merupakan kunci untuk pengembangan peranan praktisi PRO (pejabat humas) dan pencapaian profesionalisme dalam public relations (Rosady Ruslan, 2014). Dari peranan yang disebutkan, menurut Rosady Ruslan pejabat Humas akan melakukan fungsi-fungsi manajemen perusahaan, secara garis besar aktivitas utamanya berperan *communicator, relationship, back up management,* dan *good image maker*.

***Sosialiasi***

Secara umum, sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat.

Sosialisasi menurut Vander Zande (J. W. Zanden, 1979:75) ialah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Berger (1979:116), sosialisasi adalah sebuah proses melalui mana seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat dan menyebutkan bahwa sosialisasi memiliki kaitan dengan suatu peranan (role theory).

Pendapat lain menurut Denis Mcquail (1994) sosialisasi adalah proses belajar dimana kita mempelajari cara berperilaku dalam situasi tertentu dan mempelajari harapan yang sesuai dengan peran atau status tertentu dalam masyarakat.

***Definisi Konsepsional***

Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang diterapkan secara nasional di berbagai wilayah kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Di kota Samarinda, program kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok telah di tetapkan dan tercatat pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012.

Adapun batasan yang peneliti rumuskan dengan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Peran Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya mensukseskan Peraturan Walikota dengan tujuan menggerakkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok dengan menetapkan fokus peran humas sebagai *communicator*, peran humas sebagai *relationships*, dan peran humas sebagai *back up management.*

Maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah : Peran Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam Mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan aspek dinamika dari humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam menjalankan peran-perannya sebagai humas dengan didasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dalam melaksanakan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian Kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan suatu realitas sosial atau fenomena sosial yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan atau menelaah dokumen. Suatu penelitian kualitatif diekplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu (Sugeng Pujileksono, 2015).

***Fokus Penelitian***

Peneliti menentukan fokus penelitian ini yaitu pemahaman atas gambaran menyeluruh tentang peran humas dari instansi pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan walikota nomor 51 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda dengan fokus Peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok yang meliputi :

1. Peran sebagai Communicator
2. Peran sebagai Relationship
3. Peran sebagai Back-up Management

***Sumber dan Jenis Data***

 Jenis data yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data penelitian diperoleh dari *key-informan* daninforman dengan cara melakukan tanya – jawab secara langsung perihal masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling* untuk dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menunjuk *key-informan* maupun informan yaitu Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (periode 2015-2018) dan Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Data Sekunder.

Dalam penelitian ini, data pendukung yang peneliti peroleh didapatkan dari beberapa sumber, antara lain: Dokumen dan catatan yang ada; Buku-buku pustaka, hasil karya ilmiah penelitian lain, dan literatur dari internet berkaitan dengan penelitian ini.

***Teknik Pengumpulan Data***

Peneliti menggunakan cara-cara yang sesuai dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (Field Work Research) Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:
2. Observasi: peneliti melakukan pengamatan langsung guna pengumpulan data pada penelitian ini dan juga observasi merupakan suatu yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati suatu objek yaitu peran seorang humas sebagai penelitian untuk memahami suatu situasi yang kemudian akan di tindaklanjuti.
3. Wawancara mendalam: peneliti melakukan wawancara mendalam yang merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk peneliti mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab untuk mendapatkan data lengkap.
4. Dokumen dan Dokumentasi: peneliti mengumpulan data yang dilakukan guna menyempurnakan penelitian berupa suatu arsip, foto, rekaman suara, dan gambar-gambar sebagai penunjang kelengkapan data yang relevan untuk penelitian ini

***Teknik Analisis Data***

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aktivitas analisis data Model Interaktif oleh Miles and Huberman (1984) melalui tahapan yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)
2. Data Reduction (Reduksi Data)
3. Data Display (Penyajian Data)
4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Gambaran Khusus Penelitian***

Secara struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kota Samarinda memiliki struktur organisasinya sendiri dalam pembagian tugas kerja. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang terdiri dari tiga pembagian seksi, yaitu Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dari tiga sub seksi dalam Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu seksi yang mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menunjukkan beberapa kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari humas.

***Penyajian Data***

Penelitian yang dilakukan di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota nomor 51 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, peneliti telah memperoleh data-data yang akan disajikan dibawah ini yang bersumberkan dari tempat penelitian serta hasil jawaban dari pertanyaan yang penulis ajukan. Selanjutnya penulis menjelaskan Peran Humas dalam melakukan sosialisasi yang telah dilakukan oleh humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mensosialisasikan peraturan Walikota nomor 51 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu peran humas sebagai *Communicator*, peran humas sebagai *Relationship*, dan peran humas sebagai *Back Up Management*.

***Pembahasan***

Berdasarkan hasil penelitian, peran humas sebagai komunikator yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta sebagai penghubung antara organisasi kepada publiknya dapat terlihat dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh humas kepada masyarakatnya. Menurut Rosady Ruslan (2014:26) menjelaskan bahwa aktivitas utama humas yang berperan sebagai komunikator artinya humas memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi langsung secara lisan (spoken person) atau tatap muka, kemudian Rosady Ruslan (2007:10) juga menyebutkan bahwa humas berperan sebagai penghubung organisasi dengan masyarakat.

Hasil dari wawancara yang peneliti temukan bahwa kemudian humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga memanfaatkan beradaan media baru yaitu media sosial (social media). Menurut Suprawoto (2018:163) menjelaskan bahwa media sosial adalah salah satu bagian dari media baru, seperti facebook, twitter, blog, instagram, dan sebagainya. Penggunaan media sosial sebagai salah satu media yang dapat digunakan dalam menjalankan dan melaksanakan program pemerintah merupakan salah satu langkah yang cukup baik untuk seorang humas. Media tersebut dapat membantu komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tentunya akan mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat kota Samarinda terkait informasi yang ingin disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Samarinda tentang peraturan walikota nomor 51 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Humas memanfaatkan berbagai macam media sosial dalam melaksanakan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok yaitu dengan menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, dan Blog dimana akun-akun tersebut dikelola oleh bagian Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa dapat diketahui peran humas sebagai *Communicator* merupakan sebuah salah satu wujud komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda kepada masyarakat Kota Samarinda dengan berjalan dengan cukup baik. Humas sebagai penghubungan antara organisasi kepada masyarakat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam menyampaikan informasi peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perantara.

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa peran humas sebagai pihak yang membangun sebuah hubungan atau *Relationship* sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda, humas berupaya dengan sebaik mungkin untuk membangun dan membina hubungan yang saling menguntungkan bagi pihak yang menjalin kerjasama baik pihak intenal maupun pihak eksternal maupun untuk masyarakat Kota Samarinda.

Kemudian dapat diketahui bahwa peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam melaksanakan peran sebagai *Back Up Manajemen* berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dalam aktivitasnya humas terlibat dalam proses fungsi manajemen yaitu melalui proses dasar perencanaan (planning), kemudian melakukan pengorganisasian (organizing), pengkomunikasian (communicating), dan mengawasi/mengendalikan proses kegiatan (controlling) hingga sampai pada tahap evaluasi (evaluation).

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut :

1. Peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai communicator, yaitu humas menyampaikan informasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Sosialisasi secara langsung melalui penyuluhan sedangkan sosialisasi tidak langsung melalui perantara media yaitu menggunakan iklan yang ditayangkan di stasiun televisi TVRI dan STV (Samarinda TV), dan Bioskop XXI Samarinda. Humas juga melakukan sosialisasi melalui iklan yang mengudara di stasiun penyiaran radio RRI Kaltim dan Suara Mahakam. Humas menggunakan media sosial melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan Blog
2. Peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai relationship, yaitu humas menjalin hubungan baik antara organisasi yang mewakilinya dengan publik internal dan publik eksternal. Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda membina hubungan kerjasama dan saling berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling mendukung dan mensukseskan program kebijakan pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, kemudian lembaga institusi pendidikan, dan lembaga komunitas lainnya. Humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga melibatkan rekan media untuk meliput kegiatan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok.
3. Peran humas Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai Back Up Management, yaitu humas sebagai pendukung dalam proses fungsi manajemen dengan aktivitasnya dalam perencanaan (planning) ddalam penyusunan rangkaian program-program dan kegiatan-kegiatan kebijakan pemerintah. Lalu pengorganisasian (organizing) humas terlibat dalam mengkoordinasi petugas humas dalam pelaksanaan kegiatam sosialisasi. Kemudian proses pengkomunikasian (communicating) yaitu humas menyampaikan hasil rangkaian kegiatan kepada pimpinan. Kemudian tahap pengendalian (controlling) dilalui humas dengan mengontrol kegiatan yang telah dilakukan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Terakhir humas sampai pada tahap penilaian (evaluation) yaitu dengan melakukan kegiatan uji lapangan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

***Saran***

Setelah peneliti menarik kesimpulan, maka dengan demikian peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut

1. Humas dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat kota Samarinda dengan lebih melibatkan kalangan komunitas pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat tertentu sesuai dengan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang sehingga kebijakan pemerintah peraturan walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat diterapkan bersama kelompok masyarakat kecil. Serta keaktifan humas dalam memanfaatkan media massa sebagai wadah sosialisasi yang ampuh seiring mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat yang sudah paham akan teknologi canggih.
2. Humas dapat membangun kerjasama dan komitmen dengan beberapa OPD di Kota Samarinda sehingga kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak dapat terlaksana dengan maksimal sehingga kebijakan peraturan walikota yang telah dikeluarkan dapat terealisasikan dengan baik, dengan memperkuat advokasi atau aksi-aksi sosial, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi masyarakat terhadap rancangan kebijakan pemerintah.
3. Humas perlu meningkatkan pengawasan yang tepat dan pelayanan yang maksimal terhadap publik seperti memberikan informasi-informasi dalam pelayanan kesehatan sehingga mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah guna instansi terkait dapat mencapai Misi dan Visinya.

**Daftar Pustaka**

Abdulsyani, 2007. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala & Siti Karlinah, 2012. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Simbiosa Rekatama Media, Bandung.

Bungin, Burhan, 2006. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana, 2006. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hutagalung, Inge, 2015. Teori-Teori Komunikasi Dalam Pengaruh Psikologi. PT. Indeks, Jakarta.

Ihromi, T.O., 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Yayasan Obor Indnesia, Jakarta.

Kusumastuti, Frida, 2012. Dasar Dasar Humas. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Morissan, 2010. Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Narwoko, J. Dwi & Bagong, Suyanto, 2006. Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Pujileksono, Sugeng, 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Kelompok Intrans Publishing, Malang.

Ruslan, Rosady, 2001. Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2014. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satori, Djam’an dan Aan Komariah, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung

Siswanto, 2005. Pengantar Manajemen. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suprapto, Tommy, 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen dalam Komunikasi. Center for Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta

Suprawoto, 2018. Goverment Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia. Prenadamedia, Jakarta.

Yulianita, Neni, 2012. Dasar – Dasar Public Relations. Pusat Penerbit Universitas (P2U), Bandung.

***Dokumen:***

Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2016. *Berita Daerah Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok*

Pemerintah Daerah Kota Samarinda, 2008. *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*

***Internet:***

DPRD Provinsi Kalimantan Timur, 2016. Link <http://www.dprd-kaltimprov.go.id/read/news/2016/4707/sosialisasikan-kawasan-tanpa-rokok.html>, diakses 12 Oktober 2016

Detik Health, 2015. Link: <http://health.detik.com/read/2015/06/25/160316/2952362/763/kisah-robby-kenal-rokok-sejak-sd-dan-meninggal-karena-kanker-saat-26-tahun>, diakses 4 April 2016

Fakhrudin Sujarwo, 2015. Link : <http://www.fahdisjro.com/2015/04/pengertian-sosialisasi.html>, diakses 13 Maret 2018

Instagram, Promkes Samarinda, 2018. Link: https://www.instagram.com/promkes\_samarinda/ , diakses 12 Juni 2018

Prokal, 2014. Link: <http://kaltim.prokal.co/read/news/106945-perokok-semakin-muda>, diakses 4 April 2016

Prokal, 2016. Link: [http://samarinda.prokal.co/read/news/3444-*.html*](http://samarinda.prokal.co/read/news/3444-.html), diakses 13 Juni 2018